

# **SKRIPSI**

## **Analisa Penerimaan Retribusi Kendaraan Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

**Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat  
guna memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**Disusun Oleh  
SIRAJUDIN  
10576002277**

**Jurusan Administrasi Negara  
Program SI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2011**

**ABSTRAK**  
**ANALISA PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN**  
**DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN**  
**INDRAGIRI HILIR.**

**Oleh : Sirajudin**

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan daerah / dikelola dalam APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda paling lambat 1 ( Satu ) Bulan setelah APBN ditetapkan termasuk retribusi parkir ditepi jalan umum, yang sebelumnya tentang pajak dan retribusi parkir ditepi jalan umum, yang sebelumnya tentang pajak dan retribusi daerah.

Dengan adanya tempat pemerintahan, pasar dan tempat hiburan serta toko-toko, maka dari pemerintahan perlu adanya fasilitas parkir dan perlu membuat peraturan tentang masalah parkir, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan di kecamatan Tembilahan. Salah satu retribusi yang sangat menjanjikan untuk pemasukan daerah maka oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibuat Perda dengan Nomor : 21 Tahun 2001 yaitu tentang retribusi parkir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini adalah mengapa Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan setiap tahunnya tidak memenuhi target yang ditetapkan. ?

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Interview (Wawancara ) dan Observasi langsung ke lokasi penelitian serta dengan Kuisioner terhadap pengguna jasa parkir, analisa data disajikan dalam bentuk tabel yang memuat data kualitatif dan kuantitatif kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diketahui Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Pasar Tembilahan yang indikatornya kendaraan golongan I yang berupa sepeda / becak dan gerobak, yang besarnya Rp. 300,- /sekali parkir, kendaraan golongan II berupa sepeda motor / vespa yang besarnya Rp. 500,- /sekali parkir, serta kendaraan golongan III berupa kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki, truk gandeng yang besar biaya parkirnya Rp. 1.250,- sekali parkir.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	Viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1.    Lata Belakang Masalah.....	1
I.2.    Perumusan Masalah.....	12
I.3.    Tujuan Dan Manpaat Penelitian.....	13
I.4.    Sistematika Penulisan.....	14
BABII:TELAAHPUSTAKA.....	15
II.1. Retribusi Parkir.....	15
II.2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	20
II.3. Pajak Daerah.....	22
II.4. Pengawasan.....	30
II.5. Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran.....	34
II.6. Hipotesis.....	38

	II.7. Vareabel Penelitian.....	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	39
	III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
	III.2. Populasi dan Sampel.....	39
	III.3. Jenis dan Sumber Data .....	39
	III.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
	III.5. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
	IV.1. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir.....	42
	a. Geografis Kecamatan Tembilahan.....	42
	b. Iklim dan Curah Hujan.....	43
	c. Keadaan Alamnya.....	43
	IV.2. Susunan dan Tata Cara Kerja Organisasi.....	48
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
	V.1. Identitas Responden.....	51
	V.2. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan dari Hipotesis Penelitian.....	54
	a. Insentif Yang Kurang.....	54
	b. Pengawasan Dari Pemerintah atau Instansi Terkait.....	56
	V.3. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan dari Variabel Penelitian.....	60
	a. Penerimaan Retribusi Parkir.....	60
	V.4. Faktor Penghambat Tidak Tercapainya Retribusi.....	67

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
	VI.1. Kesimpulan.....	70
	VI.2. Saran-saran.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral Pembangunan Nasional tidak bisa dilepaskan prinsip Otonomi Daerah. Pembangunan yang dilakukan melibatkan berbagai komponen bangsa. Sebagian besar Otonomi Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Asas tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi bahwa “ Negara Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil yang bentuk dan susunannya ditetapkan oleh Undang – Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara serta hak asal usul di dalam daerah yang bersifat istimewa.” Sebagai wujud penghormatan terhadap hak asal usul dan identitas kedaerahan, maka di keluarkanlah kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut.

Desa merupakan lingkup wilayah terkecil yang di otonomikan karena mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul dan bersifat istimewa yang dapat menghidupkan kembali identitas kedaerahan. Seiring dengan perkembangannya, terjadi proses reformasi politik dan pergantian pemerintah pada tahun 1998 yang di refisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang - Undang ini berisi antara lain mencabut Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979. Dalam Undang – Undang ini, spirit pelaksanaan sentralisasi, birokrasi dan uniformitas seperti pada Undang – Undang Nomor 5 1974 tidak lagi di lanjutkan sehingga deregulasi dan debirokratisasi terhadap pemerintah desa mulai terjadi. Hal ini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi hidupnya kembali pemerintahan asli ditingkat desa, pengaturan tentang pemerintahan ditingkat desa yang tidak lagi diatur ditingkat nasional namun diserahkan untuk dikelola ditingkat daerah Kabupaten/ Kota. Dengan kata lain, konstitusi ini melahirkan beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Dari pengaturan tingkat nasional (UU) menjadi pengaturan daerah tingkat Kabupaten/ Kota (Peraturan daerah)
2. Dari uniformitas menjadi variatif
3. Dari dominasi birokrasi menjadi institusi masyarakat local/ adapt.

Perubahan ini akhirnya membawa implikasi pada munculnya kembali variasi antar daerah dalam model – model pemerintahan di tingkat desa (atau apapun namanya) menjadi sangat besar. Terjadinya variasi antar daerah tersebut semakin nyata, antara lain ditandai dengan semakin maraknya kebangkitan pemerintah asli sebagai pengganti desa, seperti nagari, kampong dan sebagainya. Otonomi desa merupakan otonomi yang

asli, bulat dan utuh serta pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Dari pelaksanaan terhadap pemberian otonomi kepada daerah diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui penjelasan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut dapat diketahuibahwa secara formatdisentralisai dengan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam rangka Negara kesatuan. **(Sarundajang, 2000 : 59)**

Prinsip otonomi yang diatur dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 adalah otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah otonomi yang bertanggung jawab adalah yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari kepulauan – kepulauan yang membentang dari sabang sampai merauke. Kondisi geografis yang demikian membawa dampak pada bentuk corak pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah tidak bias



dilaksanakan secara terpusat tetapi dilaksanakan secara desentralisasi. Daerah diberi kesempatan dan keleluasan untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya.

Pasal Undang – Undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil., dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang – Undang. Dalam penjelasan pasal tersebut Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dalam daerah yang lebih kecil, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang – undang.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional serta adanya keseimbangan antara keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Oleh sebab itu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Otonomi Daerah tentang keuangan yaitu UU No.32 Pasal 224 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah dan UU No 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kendaraan Bermotor Di Air dan BBN Kendaraan Bermotor Di Atas Air Tahun 2009 Pasal 151. Agar pembangunan terselenggara dengan adil, merata dan terwujudnya masyarakat adil, makmur dan merata. Maka pengaturan sumber daya nasional melakukan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani.

Pada hakekatnya pemberian otonomi daerah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan adanya kemungkinan bertujuan untuk mengoptimalkan pungutan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah. Namun pelaksanaannya masih masih menghadapi masalah karena ruang gerak untuk menggali potensi yang ada masih mengalami kesulitan.

Kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri sebagai daerah otonomi sangat ditentukan oleh tersediannya sumber – sumber pembiayaan diatur dalam Pasal 79 Undang – Undang No.22 Tahun 1999 terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah

- b. Hasil Retribusi Daerah

- c. Hasil Perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d. Lain – Lain pendapatan asli daerah

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diberikan pada daerah terdiri dari bagian dana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah), Bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah daerah), dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang tergantung pada jumlah Dana Perimbangan tersebut.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah Kabupaten/ Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten yang bersangkutan

terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot daerah Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi yang ada.

3. Pinjaman daerah

4. Lain – lain Pendapatan daerah yang sah.

Pernyataan berotonomi juga berarti beretonomey yang berarti ketidak tergantungan khususnya dalam hal keuangan daerah kepada Pusat dalam pembangunan daerah. Idealnya sumber pendapatan asli daerah harus mampu menyumbangkan bagian terbesar dari keseluruhan pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya seperti subsidi dan lainnya. Dengan proporsi seperti ini daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya. Sebaliknya terbatasnya sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan di daerah menunjukkan rendahnya kemampuan otonominya. ( **Sarundajang, 2000:108**) Sejalan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah dituntut dapat menggali potensi daerah secara maksimal dalam rangka meningkatkan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi – potensi yang dapat digali oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dan menjadi kewenangannya, yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari perusahaan milik daerah.

Kemudian manfaat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah,

sehingga semakin banyak potensi yang digali oleh Pemerintah Daerah maka semakin besar pula sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor. 34 Tahun 2004. retribusi adalah pungutan daerah sebagai atas pembayaran atas pemakaian atau memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jawaban daerah untuk mengimplemantasikan otonomi daerah, dengan mengeksplorasi sumber – sumber daerah dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan PAD suatu daerah. Seperti hal diatas bahwa dengan semakin mandiriya suatu daerah dalam hal keuangan daerah tersebut akan semakin otonom dalam mengimplementasikan daerahnya.

Di samping penyelenggaraan Otonomi daerah pelaku pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi dan tugas pembantuan maka perlu diatur pertimbangan dalam kebijakan otonomi berupa sistem yang diatur berdasarkan keuangan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan pelayanan masyarakat dan pembangunan pemerintah suatu negar mengemban 3 (tiga) fungsi utama :

1. Fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dan pelayanan masyarakat.
2. Fungsi distribusi yang meliputi pendapatan kekayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi meliputi Hankamrata.

Di sini fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi dan pelayanan masyarakat lebih efektif dilaksanakan Pemerintah Daerah. Untuk memberdayakan dan meningkatkan

kemampuan daerah/ perekonomian daerah Pasal 42 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 semua penerima dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dikelola dalam APBD. Pasal 136 ayat 1 dan 2 UU No. 32 Tahun 2004 Perda ditetapkan oleh kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan termasuk retribusi parkir di tepi jalan umum, yang sebelumnya tentang pajak dan retribusi daerah. Disebutkan juga dalam UU No 28 Tahun 2009 Pasal 157 ayat 3. Kabupaten Indragiri Hilir, dengan sendirinya adalah pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan dan pusat aktivitas-aktivitas lainnya dan terdapat fasilitas-fasilitas umum sekaligus pasar-pasar, pasar swalayan dan tempat hiburan.

Dengan adanya tempat pemerintahan, pasar dan hiburan serta toko-toko, maka dari pemerintahan perlu adanya fasilitas parkir dan perlu membuat peraturan tentang masalah keparkiran, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan di Kecamatan Tembilahan. Selanjutnya retribusi parkir adalah pungutan-pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan (Peratur Daerah No. 08 Tahun 1998 yaitu tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum). Subjek retribusi parkir adalah pemilik pengemudi kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor yang melakukan parkir di tepi jalan umum. Golongan retribusi termasuk golongan retribusi berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir. Manfaat dari Pendapatan Asli Daerah {PAD} adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga semakin banyak potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah maka

semakin besar pula sumber PAD yang dapat di anfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah {PAD} adalah Retribusi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. retribusi adalah pungutan daerah sebagai atas pembayaran atas pemakaian atau memperoleh jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jawaban daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah, mengeksplorasi sumber-sumber daerah dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan PAD suatu daerah.

Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan dilakukan Pemerintahan Daerah secara operasional pelaksanaan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan yang dipungut biaya :

#### 1. Fasilitas parkir tetap

Fasilitas parkir tetap dapat dilakukan :

- a. Pusat perkantoran swasta.
- b. Pusat perdagangan eceran atau swalayan.
- c. Pasar.
- d. Tempat Praktek Dokter.

#### 2. Fasilitas parkir sementara

Fasilitas parkir sementara dapat dilakukan :

- a. Tempat pertunjukan yang bersifat sementara.
- b. Tempat pertandingan olahraga.

Berdasarkan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis untuk satu kali parkir adalah :

1. Sepeda = Rp. 300,-
  2. Sepeda Motor = Rp. 500,-
  3. Gerobak/ Becak = Rp. 300,-
  4. Mobil Barang Truk Gandengan = Rp. 2.500,-
  5. Mobil Alat Berat = Rp. 3.000,-
3. Sikap pemilik kendaraan

Mengenal sikap juru parkir ini bermacam-macam ada yang tidak mengembalikan uang sisa pembayaran ada yang mengembalikan uang sisa parkir.

Dari jumlah kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat baik kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, juga kendaraan tidak bermotor. Salah satu retribusi yang menjanjikan untuk pemasukan daerah maka oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibuat Perda dengan Nomor : 08 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi dengan Perda Nomor : 21 Tahun 2001 yaitu tentang retribusi parkir, maka dari Pemerintah Daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir ini memberi target kepada Instansi terkait untuk sarana pemasukan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Guna melihat target dan realisasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat tabel berikut ini

**Tabel I.1 :Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006-2009.**

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
----	-------	--------	-----------	------------

1..	2006	11.400.000,-	7.900.000,-	69,30 %
2.	2007	14.000.000,-	1.450.000,-	7,27 %
3.	2008	40.000.000,-	17.000.000,-	43,00 %
4.	2009	40.000.000,-	20.000.000,-	50,00 %

**Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil 2009.**

Dari target yang diharapkan dan sesuai dengan sumber-sumber yang ada yaitu jumlah keadaan dan obyek-obyek yang ada. Maka dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memberi target sejak tahun 2006 target yang dicapai hanya terealisasi 69,30 %, 2007 target yang dicapai hanya terealisasi 7,27 %, 2008 target yang dicapai hanya terealisasi 43,00 % dari target, sedangkan tahun 2009 realisasi retribusi parkir hanya mencapai 50 %

Adapun Karcis yang disebarkan kepada Instansi antara lain :

1. Sejak 2006 Karcis yang di sebarakan kepada Instansi yang terkait sebanyak 2500 Karcis.
2. 2007 yang di sebarakan kepada Instansi 3000 Karcis.
3. 20008 yang di sebarakan kepada Instansi 9300 Karcis.
4. 20009 yang di sebarakan kepada Instansi 9300 Karcis.

Adapun yang menjadi dasar dalam penetapan atau target dalam retribusi parkir adalah sesuai dengan peraturan tersebut. Dari gejala-gejala tersebut di atas maka penulis merumuskan tentang :

**“Analisa Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”.**

## **I.2. Perumusan Masalah**



Dari latar belakang masalah dimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir, yang diharapkan sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dari tahun ke tahun jenis kendaraan bertambah, kendaraan golongan I atau kendaraan tidak bermotor, kendaraan golongan II atau kendaraan bermotor roda dua seperti sepeda motor dan Vespa, kendaraan golongan III yaitu kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Kijang dsb dan kendaraan golongan IV berupa mobil-mobil berskala besar, dari model atau kendaraan yang ada akan merubah income Pendapatan Daerah (PAD) guna pembangunan daerah, tetapi dalam harapan tadi belum dapat memenuhi harapan yaitu target yang diinginkan tidak tercapai. Maka penulis ingin merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

**Mengapa Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Setiap Tahunnya Tidak Memenuhi target yang telah ditetapkan.**

### **I.3. Tujuan Penelitian.**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan di Pasar Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

### **I.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan pada instansi terkait dalam pembinaan dan pengawasan dalam retribusi parkir sebagai masukan dan pengawasan dalam retribusi parkir sebagai pemasukan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Sebagai bahan tujuan pencapaian target pemasukan asli daerah kabupaten Indragiri Hilir yang telah ditetapkan.

- c. Sebagai masukan bagi pemerintah setempat di Kabupaten Indragiri Hilir
- d. Sebagai salah satu ayarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Ilmu Sosial Di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

## **I.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan beberapa landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan secara lebih lanjut dimana teori yang dihubungkan dengan hasil penelitian akan dapat menghasilkan suatu hipotesa dan variable penelitian.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan Sejarah singkat berdirinya Kab Inhil serta Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dan Tata Kerja Organisasi.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Mepakan Bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulisan permasalahan tersebut di atas yang berguna bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang akan datang.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **II.1. Retribusi Parkir**

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa – jasa Negara. (Soemitro, 1995 : 15). Sedangkan Suparmoko retribusi suatu pembayaran rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diberikan dengan pembayaran itu. (Suparmoko, 1990 : 144).

Dari definisi itu dapat dikatakan bahwa retribusi sebenarnya merupakan imbalan yang diterima dari Negara. Lebih jelas Manulang mendefinisikan retribusi daerah sebagai pembayaran pembagian atau karena memperoleh jasa, pekerjaan atau usaha milik daerah yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu Undang – undang No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang – undang No. 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. (**Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah**)

Dalam Pelaksanaan Retribusi Daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah dalam melakukan tindakan berupa suatu keputusan. Menurut (S.P.Siagian,2003:5) Kepemimpinan merupakan inti Manajemen. Demikian halnya kepemimpinan

merupakan “Motor atau daya penggerak semua sumber-sumber dan alat-alat (resources) yang tersedia bagi suatu organisasi.

” Resources itu digolongkan kepada dua golongan besar, yaitu “

1. Sumber daya manusia, dan

2. Sumber daya lainnya



Karna dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung atas kemampuan para anggota pimpinannya untuk menggerakkan sumber-sumber dan alat-alat tersebut sehingga penggunaanya berlangsung dengan efisien, ekonomis dan efektif. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan Pemimpin yang dapat kita jumpai pada semua tingkatan dan semua bidang manajemen. Pengambilan keputusan bagi suatu pemecahan masalah sering tidak selaras dengan ketentuan yang ada pada umumnya didasarkan pada pendapat dan pertimbangan dari pada teknik perilaku. Dalam buku (S.P.Siagian,2003:38) menyebutkan Konsekuensi dari tugas pokok pemimpin itu ialah bahwa sebagian besar waktu dari setiap pemimpin harus dipergunakan untuk mengambil keputusan.

Maka salah satu persyaratan kepemimpinan yang perlu dipenuhi oleh setiap orang yang menduduki jabatan kepemimpinan ialah keberanian untuk mengambil suatu keputusan yang cepat, tepat, praktis, dan rasional serta memikul tanggung jawab atas akibat dan resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari pada keputusan yang diambil. Keberanian tersebut dapat timbul jika :

1. Pemimpin mempunyai analisa yang tinggi

2. Pemimpin mengetahui pengaruh dari factor lingkungan tempat organisasi yang dipimpinnya bergerak
3. Secara teknis mengetahui apa yang hendak dicapai oleh organisasi yang dipimpinnya
4. Pemimpin yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dirinya sendiri, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, termasuk didalamnya kemampuan dan kemauan belajar terus menerus
5. Pemimpin mendalami tentang perilaku bawahannya, karena dalam kerangka kepemimpinan perilaku bawahan itu sangat besar pengaruhnya dalam berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut S.P.Siagian pada hakikatnya Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan firman ALLAH SWT dalam surat an- nissa' ayat 59 yang berbunyi:


Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari firman diatas jelas sekali kata disuruh untuk memilih pemimpin diantara kita di dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegeara.

Menurut Newman (1996:117) pengambilan keputusan menyangkut 4 (empat) langkah yaitu :

1. Menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya
2. Pemikiran satu atau lebih pemecah masalah
3. Proyeksikan dan bandingkan konsekuensi dari pada alternative

Bentuk penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihan langkah tindakannya.

UUNo.32 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 dan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 160 ayat 5, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana disebut dalam pasal 4 huruf a dan b diatur dengan undang –undang. Dalam pengaturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Daerah tentang Parkir adalah Perda No. 21 Tahun 2001 yaitu tentang retribusi parkir.

Menurut Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001, pengertian retribusi parkir dipungut retribusi kendaraan yang memarkir kendaraannya di dalam Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun objek retribusi adalah kendaraan yang dipergunakan dalam Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan sabjeknya adalah setiap orang pribadi atau badan Hukum, organisasi dan atau kelompok/ perkumpulan yang memiliki, menggunakan, memakai atau menyewa kendaraan. Yang dimaksud dengan retribusi menurut Suparnoto(1992:49) adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada

Negara, dimana dapat melihat lembaga antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Selanjutnya apa yang dijelaskan oleh Soedargo (1996:1) retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa dari orang yang menikmatinya atau orang yang berkepentingan dalam arti bila setiap pembayaran retribusi dilakukan berarti yang membayar akan dapat menikmati balas jasa langsung dari Negara. Menurut Perda (Peraturan Daerah) No. 21 Tahun 2001 retribusi parkir dipungut bagi kendaraan yang memarkir kendaraannya di dalam tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya obyek retribusi parkir adalah kendaraan yang dipergunakan dalam Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, menurut Perda No. 21 pasal 5 tarif retribusi setiap kali parkir :

1. Kendaraan golongan I adalah kendaraan tidak bermotor berupa becak, sepeda dan gerobak Rp. 300,- sekali parkir.
2. Kendaraan golongan II adalah bermotor roda dua, berupa sepeda motor dan vespa dengan besarnya retribusi Rp. 500,- sekali parkir.
3. Kendaraan golongan III adalah kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, kijang, minibus, dengan besarnya retribusi Rp. 1000,- sekali parkir.
4. Kendaraan golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, tangki ukuran sedang dengan besarnya retribusi Rp. 1500,- sekali parkir.
5. Kendaraan golongan V adalah kendaraan bermotor berupa mobil barang, tangki dan truk gandeng, dengan panjang 5 m dengan besarnya retribusi Rp. 2500,- sekali parkir.



6. Kendaraan golongan V adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus besar, truk gandeng lebih 5 m dan alat berat dengan besarnya retribusi Rp. 3000,- sekali parkir.

Pasal 8 ayat 2 fasilitas parkir tetap dapat dilakukan pada :

1. Pusat pertokoan
2. Pusat pedagang eceran atau swalayan.
3. Pasar.
4. Tempat praktek Dokter.

Pasal 8 ayat 3 lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir sementara dapat dilakukan

1. Tempat pertunjukan yang bersifat sementara.
2. Tempat pertansingan olahraga.

## **II.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**

UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta warga dan kenegaraman daerah. Pasal 10 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari peraturan perundang-undangan yang lebih memuat ketentuan tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Pasal 155 ayat 3 dan Pasal 156 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada daerah pejabat perangkat daerah. Masalah keuangan daerah guna penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan DPRD. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 180 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004, Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Peraturan menteri dalam negeri No 32 tahun 2008, tentang Sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
4. Bagi daerah yang belum menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dana sumbangan pihak ketiga pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) supaya dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2009 dianggarkan pada SKPKD.

### **II.3. Pajak Daerah**

Sebelum mengetahui apa itu retribusi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pajak daerah karena pajak merupakan salah satu unsur yang dapat meningkatkan PAD daerah itu sendiri selain retribusi. Sebelum diuraikan pengertian pajak daerah, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pengertian pajak secara umum menurut pendapat dari beberapa ahli ekonomi.

Yang dimaksudkan dengan pajak menurut Andriani (1992:2) adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat kembali, yang secara langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Usman (1992:16) pajak dapat juga diartikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang batasnya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, dimana perlu dilaksanakan.

Sumber penerimaan Negara ini dapat berasal dari pajak langsung dan pajak tak langsung.

#### 1. Pajak Langsung.

Pajak langsung adalah pajak yang dalam arti ekonomi bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain oleh si wajib pajak.

#### 2. Pajak Tak langsung.

Pajak Tak Langsung adalah merupakan pajak yang bebannya dapat dilemparkan atau digeserkan kepada pihak lain dengan kata lain dalam arti administrasi yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pengertian pajak ialah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipungut Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembiayaan pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran tersebut mempunyai arti atau manfaat bagi masyarakat umum.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi oleh pemerintah secara langsung dengan besarnya pajak.

Menurut UU No 28 Pasal 2 Tahun 2009. Tentang Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan perpajakan daerah.

Selanjutnya Retribusi Daerah, yang disebut Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sebagai mana di sebut kan juga dalam UU No. 28 Pasal 108 109 dan 110 Tahun 2009 Tentang Objek dan Golongan Retribusi.

Menurut Soetrisno (1994:201) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pungutan pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak Negara yang pengolahannya diserahkan kepala daerah guna membiayai pengeluaran daerah sebagai beban publik.

Senada juga dikemukakan oleh Manulang (1993:78) bahwa pajak daerah adalah merupakan pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna membiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Sedangkan menurut Yanti B. (1992:169) pajak daerah adalah pungutan menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai hukum publik.

Pajak daerah adalah pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perundang-undangan yang dikenal pula dengan istilah Peraturan Daerah (Perda). Jadi pada dasarnya pengertian pajak daerah adalah sama dengan pengertian pajak daerah tidak diperkenankan dilaksanakan bila jenis pajak tersebut telah dipungut oleh Negara. Dengan demikian lapangan pajak yang belum diusahakan oleh Negara.

Sedangkan menurut Maskun (1995:215) untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meletakkan titik berat otonomi pada daerah tingkat II, maka pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan daerah, melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggali serta mengembangkan potensi-potensi yang ada jenis pajak daerah.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pajak daerah yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Rachmad (1994:8) bahwa fungsi pajak daerah pada turunya adalah :

Berfungsi sebagai Budgetair yaitu merupakan sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyak ke dalam kas negara/ daerah yang pada waktunya akan digunakan untuk pengeluaran rutin.

Berfungsi mengatur (regular) yaitu bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar badan keuangan.

Setelah melihat dari definisi di atas maka tampak bahwa pajak daerah sangatlah penting untuk diketahui, karena dengan mengetahui terlebih dahulu lapangan pajak daerah akan mengetahui batas-batas sejauh mana wewenang daerah untuk melakukan pungutan pajaknya. Jadi yang dimaksud dengan lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digali dan dilaksanakan pungutannya oleh Negara atau dapat pula disebut sisa dari lapangan pajak Negara yang telah diserahkan kepada daerah.

Adapun maksud pembagian dari lapangan pajak ini adalah untuk menghindari pajak berganda atau jangan sampai terjadi pajak yang telah dipungut Negara kemudian dipungut oleh daerah. Dengan demikian lapangan pajak tingkat I adalah seluruh lapangan pajak yang bukan lapangan pajak Negara dan lapangan pajak daerah tingkat II

adalah seluruh lapangan pajak yang bukan lapangan pajak Negara dan lapangan pajak daerah tingkat I.

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan haruslah memiliki beberapa criteria, seperti :

1. Kejelasan tujuan :
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan :
3. Dapat dilaksanakan :
4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan :
5. Kejelasan rumusan : dan
6. Keterbukaan.

Secara lebih spesifik, UU No. 33/2004 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. :
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

Di samping ketentuan diatas, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi juga harus memperhatikan materi muatan dari masing-masingnya, seperti berikut :

Peraturan Daerah tentang Pajak, muatan materinya yaitu :

1. Nama, objek pajak, dan subjek pajak :
2. Dasar pengenaan, tariff dan cara perhitungan pajak :

3. Wilayah pemungutan :
4. Masa pajak :
5. Penetapan :
6. Tata cara pembayaran dan penagihan :
7. Kadaluarsa :
8. Sanksi administrasi (dapat juga memuat sanksi pidana maksimal 6 bulan) :
9. Tanggal mulai berlakunya.

Sementara itu muatan materi yang minimal harus terdapat di dalam peraturan daerah tentang retribusi adalah sebagai berikut :

1. Nama, objek dan subjek retribusi :
2. Golongan retribusi (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu):
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa :
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi :
6. Wilayah pemungutan :
7. Tata cara pemungutan :
8. Sanksi administrasi :
9. Tata cara penagihan :
10. Tanggal mulai berlakunya.
11. Pendekatan Substansi

Proses evaluasi peraturan daerah dilakukan dengan mengikuti mekanisme berikutnya :



Pertama : yang penting dinilai adalah substansi dari isi peraturan daerah apakah peraturan daerah tersebut domain kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya, pada tahap ini evaluasi peraturan daerah difokuskan kepada substansi peraturan daerah tersebut, peraturan daerah Kabupaten/ Kota tidak dapat memuat ketentuan yang mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut ketentuan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/ Kota, seperti berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (tarif maksimum 5%)
- b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (maksimum 10%)
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (maksimum 5%)
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (maksimum 20%)

2. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota

1. Pajak Hotel (maksimum 5%)
2. Pajak Restoran (maksimum 10%)
3. Pajak Hiburan (maksimum 35%)
4. Pajak Reklame (maksimum 25%)
5. Pajak Penerangan Jalan (maksimum 10%)
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (maksimum 20%)
7. Pajak Parkir (maksimum 20%)

Di samping jenis pajak-pajak di atas, Kabupaten/ Kota diberikan kewenangan untuk menambah jenis pajak baru dengan memperhatikan kriteria-kriteria pajak yang ditetapkan.

Kedua, menilai apakah peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan daerah juga tidak lagi dapat mengatur hal atau sesuatu yang telah diatur di atasnya, misalnya tentang pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, untuk perizinan dan pajak, Kabupaten/ Kota tidak lagi boleh mengatur tentang hal tersebut karena menjadi domain kewenangan Provinsi.

Ketiga, khusus untuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang patut mendapatkan penilaian adalah penetapan Perda tersebut dapat atau telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat? Menurut ketentuan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah menyebutkan bahwa dalam membuat peraturan tentang pendapatan, daerah dilarang membuat peraturan yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa dan menghambat ekspor impor. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar daerah dapat menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi agar tetap dinamis.

Ke empat, peraturan daerah dapat di evaluasi dengan cara menilai apakah struktur bahasanya telah sesuai dengan kaidah normative penyusunan peraturan perundang-undangan.

#### **II.4. Pengawasan**

Menurut Sarwoto (1993:94) pengertian pengawasan antar lain mengatakan bahwa pengawasan kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Sukarno K.(1993:107) Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan terdiri dari pengajuan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan instruksi yang telah diberikan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan dan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulang kembali. Dalam hal perkiraan ini pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara fungsional.

Adapun tujuan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang sudah terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan kiretif yang perlu. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Selanjutnya Siagian (1995:138) mengatakan dan ciri-ciri dan teknik suatu proses pengawasan yaitu :

1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pengawasan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dijalankan dalam organisasi terpaut dengan

tugas tentunya ada faktor lainm seperti factor biaya, tenaga kerja,system prosedur kerja struktur organisasi dan factor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan lain sebagainya.

2. Pengawasan harus bersifat prevcerentif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang ditetapkan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang dan hal ini berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efesiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Pengawasan hanya sebagai alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan kerja harus efesiensi jangan sampai terjadi pengawasan menghambat tingkat efesiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siap yang bersalah jika ada ketidak beresan, akan tetapi untuk menentukan yang mana yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar par pelaksanaannya meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan.

Sedangkan teknik pengawasan itu ada dua macam yaitu :

1. Pengawasan langsung (Direct Controll) yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan. Pengawasan ini dapat dibentuk :
  - a. Inspeksi langsung.

- b. On the sport observation.
  - c. On the sport report.
2. Pengawasan tidak langsung (Indirect Controll) yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dimana laporan ini dapat berbentuk :
- a. Secara tertulis.
  - b. Secara lisan.

Mengadakan tindakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang nyatanya menyimpang, agar sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

Pada tahap awal setiap proses pengawasan harus diawali dengan penepatan standar atau alat pengukur yang ditetapkan atas dasar hasil akibat yang benar-benar terjadi yang dapat dinilai. Setelah melewati tahap awal, maka dapat dilakukan penilaian atas hasil-hasil yang ada berdasarkan standar yang telah ditentukan. Penilaian merupakan proses pengukuran dan perbandingan dengan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dari sini dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan atau ketidaksesuaian dan bila ditemukan hal tersebut upaya selanjutnya adalah melakukan tindakan koreksi (perbaikan), sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan penyimpangan dapat dihindari.

## **II.5. Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran.**

Untuk menghilangkan salah satu penafsiran dalam penelitian ini dan untuk mempermudah dalam penganalisaan, maka penulis ingin mengoperasionalkan teori-teori yang ada sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah UU tentang otonomi daerah dan telah di Refisi ulang menjadi UU No.32 Tahun 2004.
2. Pajak adalah pungutan kepada masyarakat yang dipaksakan hasilnya untuk public.
3. Pajak daerah adalah pungutan kepada masyarakat yang dipaksakan yang pungutannya memakai peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan hasilnya untuk kepentingan umum dan pembayaran pembangunan.
4. Retribusi daerah adalah pungutan dari balas jasa yang dipungut oleh daerah dan untuk kepentingan daerah.
5. Retribusi parkir adalah pungutan bagi kendaraan baik bermotor maupun kendaraan tidak bermotor yang memarkirkan kendaraan.
6. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada fasilitas parkir tetap dan fasilitas parkir sementara.
7. Fasilitas parkir yaitu pasar, pedagang eceran, di depan toko dll.
8. Fasilitas parkir sementara yaitu tempat pertunjukan yang bersifat sementara dan tempat pertandingan-pertandingan olahraga.
9. Kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di dalam Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi sepeda, gerobak, becak, sepeda motor, mobil, dan bus, serta praoto alat berat.

#### Teknik Pengukuran.

1. Kendaraan golongan I adalah kendaraan tidak bermotor berupa sepeda dan gerobak yang besarnya retribusi parkir sepeda Rp. 300,- setiap kali parkir.

Baik : Apabila pemungutan retribusi parkir memungut retribusi kendaraan sepeda, becak dan gerobak dipungut Rp. 300,- sekali parkir dengan karcis tanda bayar.

Cukup Baik : Apabila pemungutan retribusi parkir memungut retribusi kendaraan tidak bermotor berupa sepeda, becak dan gerobak dipungut Rp. 300,- tetapi kadang-kadang tidak memakai karcis tanda bayar.

Tidak Baik : Apabila pemungutan retribusi parkir memungut retribusi tidak sesuai dengan aturan dan tidak memakai karcis tanda bukti.

2. Kendaraan golongan II adalah kendaraan bermotor roda dua, termasuk jenis sepeda motor dan vespa dengan tariff Rp. 500,-

Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi sepeda motor dan vespa sebesar Rp. 500,- dan disertai bukti karcis.

Cukup Baik: Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi sepeda motor dan vespa Rp. 500,- tetapi kadang-kadang tidak disertai bukti karcis.

Tidak Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi sepeda motor dan vespa sebesar Rp. 500,- dan tidak memakai karcis.

3. golongan III adalah kendaraan bermotor mobil jeep, kijang, sedan, minibus, dll yang besarnya retribusi parkir sebesar Rp. 1000,- sekali parkir.

Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi mobil jeep, kijang, minibus, sedan dll sebesar Rp. 1000,- dan disertai bukti karcis.

Cukup Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi motor jeep, kijang, minibus, sedan dll sebesar Rp. 1000,- tetapi kadang-kadang tidak disertai bukti karcis.

Tidak Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi mobil jeep, kijang, minibus, sedan dll sebesar Rp. 1000,- dan tidak memakai karcis.

4. Kendaraan golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa bus, tangki yang panjangnya 5 m dan sejenisnya dengan retribusi parkir sebesar Rp. 1200,- sekali parkir.

Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi bermotor berupa bus, tangki dengan retribusi sebesar Rp. 1200,- dan disertai bukti karcis.

Cukup Baik: Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi bermotor berupa bus, tangki dengan retribusi sebesar Rp. 1200,- tetapi kadang-kadang tidak disertai bukti karcis.

Tidak Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi bermotor berupa bus, tangki dengan retribusi sebesar Rp. 1200,- dan tidak memakai karcis.

5. Kendaraan golongan V adalah kendaran bermotor mobil bus ukuran besar, truk gandengan dengan retribusi parkir sebesar Rp. 1000,- sekali parkir.

Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi bermotor berupa mobil bus ukuran besar, truk gandeng, dengan retribusi sebesar Rp. 1500,- dan disertai bukti karcis.



Cukup Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi bermotor berupa mobil bus ukuran besar, truk gandeng dengan retribusi sebesar Rp. 1500,- tetapi kadang-kadang tidak disertai bukti karcis.

Tidak Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi bermotor berupa mobil bus ukuran besar, truk gandeng dengan retribusi sebesar Rp. 1500,- dan tidak memakai karcis.

6. Kendaraan golongan VI a/b adalah kendaraan bermotor berupa mobil barang, mobil truk gandeng, alat-alat berat dengan retribusi sebesar Rp. 2500,- sekali parkir.

Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi berupa mobil barang, mobil truk gandeng, alat-alat berat dengan retribusi sebesar Rp. 2500,- dan disertai bukti karcis.

Cukup Baik : Apabila petugas pemungut retribusi parkir memungut retribusi berupa mobil barang, mobil truk gandeng, alat-alat berat dengan retribusi sebesar Rp. 2500,- tetapi kadang-kadang tidak disertai karcis.

Tidak Baik: Apabila pemungut retribusi parkir memungut retribusi memungut bermotor berupa mobil barang, mobil truk gandeng, alat-alat berat dengan retribusi sebesar Rp. 2500,- dan tidak memakai karcis.

## **II.6. Hipotesis**

Berdasarkan dari perumusan masalah pokok penelitian yang telah dikemukakan terdahulu, maka berikut ini dapat pula dikemukakan hipotesa penelitian sebagai berikut :

**Diduga tidak tercapainya Retribusi Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan setiap tahunnya dikarenakan :**

1. Insentif yang kurang.
2. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah atau instansi terkait.

## **II.7. Variabel Penelitian**

1. Penerimaan Retribusi Parkir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian di dalam Penelitian ini guna memperoleh data yang diperlukan maka penulis menyusun metode penelitian survei deskriptif yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu.

#### **III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2009 sampai April 2010.

#### **III.2. Populasi dan Sampel**

1. Populasi adalah petugas parkir. Sedangkan sampel penelitian ini diambil 30 responden dari 46 responden yang bertugas di Tembilahan Kota..
2. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *accidental sampling*, yaitu cara memilih elemen-elemen untuk menjadi anggota sampel ditentukan dengan subyektif sekali atau sesuka hati.

#### **III.3. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang datanya meliputi :

##### **a. Pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2001 tentang parkir kendaraan bermotor.**

1. Retribusi sepeda/ becak
2. Retribusi sepeda motor.
3. Retribusi mobil

b. Faktor penghambatan pelaksanaan retribusi parkir.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah yang datanya meliputi :

a. Struktur Organisasi.

b. Jumlah Petugas

c. Jumlah Kendaraan

1. Sepeda

2. Becak

3. Sepeda Motor

4. Mobil dll

### **III.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengambilan ini dipergunakan metode pengumpulan data :

1. Wawancara : Yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden tentang pemungutan retribusi parkir dan fasilitas pemungutannya.

2. Observasi : Yaitu pengamatan langsung pada lokasi penelitian tentang retribusi parkir dan pemungutannya.

3. Quisioner : Yaitu melakukan Tanya jawab secara tertulis mengenai pengaturan retribusi parkir.

### **III.5. Teknik Analisis Data**

Setelah data diperoleh, data dikumpulkan sesuai jenisnya. Selanjutnya diolah, dianalisa dan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat data kualitatif dan kuantitatif. Sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **IV.1. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir**

Pada tahun 1953, pada konvensi partai masyumi se Inhil di Gedung Musyawarah Sa'adah El Islamiah Tembilahan, H. Abd. Hamid Abdullah, mencetuskan pertamakali berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya Beliau terus berusaha, agar Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kabupaten otonomi dengan tujuan agar Inhil mencapai kemajuan dalam pembangunan. Akhirnya cita-cita tersebut tercapai, dengan terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir, 14 Juni 1965 sudah resmi lepas dari Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat).

##### **a. Geografis Kecamatan Tembilahan**

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu dari dua belas (12) kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai luas 377.99 Km<sup>2</sup> atau 37,799 Ha yang terdiri dari 7 Kelurahan dan 3 Desa dengan posisi :

- 103<sup>0</sup> 0' 12,15"BT s/d 103<sup>0</sup> 14' 53,40"BT.

- 0<sup>0</sup> 16' 8,48 BT s/d 0<sup>0</sup> 27' 25,05 LS.

Wilayah Kecamatan Tembilahan berbatas dengan :

Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka.

Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Tuaka.

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok.

Sebelah Barat dengan Kecamatan Tempuling.

## **b. Iklim dan Curah Hujan**

Kecamatan Tembilahan merupakan daerah gambut, maka daerah ini di golongkan beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan di daerah ini dengan ketinggian dari permukaan laut rata – rata 2,5 meter, tercatat dari hujan yang tertinggi pada bulan November, sedangkan angka terendah pada bulan Februari dan September.

## **c. Keadaan Alamnya**

Keadaan tanah di Kecamatan Tembilahan sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa – rawa. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Di tepi – tepi sungai dan muara parit – parit banyak terdapat tumbuh – tumbuhan seperti pohon nipah. Adapun salah satu sumber pendapatan asli daerah retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa Negara. (Soemitro, 1995 : 15). Telah banyak para ahli mengatakan bahwa dalam PAD masih jauh dari yang diharapkan sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat pernah berkurang. Guna mencapai kemajuan dalam pembangunan maka dari itu Dispenda dengan tujuan antara lain :

### **1. Fungsi**

- a. Melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran di Bidang Penerimaan Daerah
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi pada semua pihak yang terkait dengan penerimaan pendapatan daerah.
- c. Melaksanakan rencana operasional penerimaan pendapatan daerah dan melakukan upaya pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran.

d. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas kegiatan ketatausahaan, program, pendapatan/ penetapan, penagihan, retribusi/ pendapatan lain-lain dan pendapatan pajak dan non pajak.

e. Melaksanakan tugas lainnya yang limpaikan oleh Bupati Indragiri Hilir.

## 2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah terwujudnya penerimaan pendapatan daerah yang optimal. Adapun Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data dan serta pengkajian potensi penerimaan pendapatan asli daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah.
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap wajib pajak/ wajib retribusi.

Keberhasilan tugas dalam suatu organisasi tidak dapat ditentukan dari perlengkapan kerja yang serba modern, tetapi harus didukung oleh personil atau



pegawai yang mempunyai kemampuan dan etos kerja tinggi. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai jumlah pegawai menurut Perda No. 15 Tahun 2004 yaitu berjumlah 46 orang, yang terdiri dari laki-laki 36 orang dan perempuan 10 orang seperti tabel di bawah ini :

**Tabel IV.2 : Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1.	Laki – laki	36	78, 26
2.	Perempuan	10	21, 74
		46	100, 00

**Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, 2009.**

Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai jumlah personil yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diharapkan memperlancar tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah pajak dan retribusi dalam rangka pencapaian PAD Kabupaten Indragiri Hilir.

Pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari berbagai tingkat dan berbagai disiplin ilmu. Pendidikan pegawai dapat menentukan golongan serta pengkajian dari antar pegawai, disamping itu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir individu, semakin tinggi pendidikan pegawai akan lebih baik pola pikir dan sekaligus akan berpengaruh dengan kinerja pegawai. Di samping itu pendidikan pegawai dituntut kualitas dalam menghadapi era keterbukaan. Untuk melihat jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah dirinci menurut pendidikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.3 : Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Dirinci Menurut Pendidikan.**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Keterangan
1.	SD	-	-
2.	SMP	2	-
3.	SLTA	16	-
4.	Sarmud/ D. III	4	-
5.	S1	24	-
		46	-

**Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, 2009**

Dari tabel diatas perbandingan jenjang pendidikan S1 Berjumlah 24 Orang dan SLTA 16 Orang dan dituntut untuk menyelesaikan pendapatan daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melihat golongan pangkat pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.4 : Golongan Pangkat Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.**

No	Golongan Pangkat	Frekuensi	Keterangan
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	14	-
3.	Golongan III	30	-
4.	Golongan IV	2	-
		46	-

**Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, 2009**

Dari tabel di atas golongan pangkat pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, golongan disamping ditentukan dari pendidikan, juga dari masa kerja, yang berarti apabila golongan III keatas, pegawai tingkat skill dan pengalaman kerja akan berpengaruh pada kinerja, juga akan menyelesaikan pekerjaan yang baik sesuai dengan Dinas Pendapatan Daerah sebagai sumber dana dari kegiatan daerah.

Masa kerja pegawai dapat dilihat pada tabel masa kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melihat masa kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.5 : Masa Kerja Pegawai Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.**

No.	Masa Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	0 - 4 Tahun	5	-
2.	0 - 9 Tahun	20	-
3.	10 - 14 Tahun	10	-
4.	15 - 20 Tahun	7	-
5.	20 - Tahun Keatas	4	-
		46	-

**Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, 2009.**

Dari masa kerja pegawai terbanyak 5 – 9 tahun sebanyak 20 orang, masa kerja 10 – 14 tahun sebanyak 10. Dari Komposisi masa kerja juga akan berpengaruh kepada tingkat skill pegawai.

## **IV.2. Susunan dan Tata Kerja Organisasi**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai suatu organisasi / lembaga pemerintahan mempunyai susunan dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepada Dinas yaitu pejabat struktur yang diangkat oleh Bupati Indragiri Hilir yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang dengan Eselon II/b.

2. Kabag TU yaitu pejabat struktur yang diangkat oleh Bupati membantu Kepala Dinas dalam bidang ketatausahaan dan Administrasi Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian TU dengan Eselon III/a. Kabag TU dibantu oleh 2 kasubbag.

3. Kabid Keuangan dan Perlengkapan yaitu pejabat struktur yang diangkat oleh Bupati yang membantu Kepala Dinas dalam bidang Pendapatan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Eselon III/a dan dibantu oleh :

a. Seksi Pendapatan dan Penetapan yang dipimpin seorang Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.

b. Seksi Pemeriksaan Data dan Dokumen yang dipimpin seorang Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.

4. Kabag Umum dan Kepegawaian yaitu pejabat struktur yang diangkat oleh Bupati yang membantu Kepala Dinas dalam bidang Pendapatan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Eselon III/a dan dibantu oleh :

a. Seksi Pendapatan dan Penetapan yang dipimpin seorang Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.

- b. Seksi Pemeriksaan Data dan Dokumen yang dipimpin seorang Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.

5. Kabid Pendataan dan Pemungutan dengan Eselon III/a dan di Bantu oleh :

- a. Seksi Pajak dan Non Pajak yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan Eselon III/a.
- b. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan Eselon III/a.

6. Kabid Pembukuan dan Verifikasi yang membantu Kepala Dinas dalam bidang Pembukuan dan Verifikasi yaitu pejabat struktural yang diangkat oleh Bupati dengan Eselon III/a dan dibantu oleh seksi-seksi :

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi yang menyelenggarakan pencatatan dan penerimaan pajak/ retribusi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan Eselon III/a.
- b. Seksi Pelaporan dan Retribusi terhadap wajib pajak yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.

7. Kabid Penagihan yang membantu Kepala Dinas dalam bidang penagihan yang diangkat oleh Bupati dengan Eselon III/a yang dibantu oleh seksi-seksi:

- a. Seksi Penagihan dan Pengalihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.
- b. Seksi Pertimbangan Penyelesaian Keberatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.

8. Kabid Pengawasan dan Ketertiban yang diangkat oleh Bupati dengan Eselon III/a yang dibantu oleh seksi-seksi:

- a. Seksi Penagihan dan Pengalihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.
- b. Seksi Pertimbangan Penyelesaian Keberatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan Eselon IV/a.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **V.1. Identitas Responden**

Sebelum menguraikan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan terlebih dahulu dibahas tentang responden penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai uraian identitas responden ini adalah mengetahui secara jelas background responden, sehingga hasil dari jawaban responden tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dari hasil angket yang disebarakan maupun wawancara langsung. Berikut table mengenai identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin responden :

**Tabel V.6 : Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin Pada Tembilahan Kota di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1.	Laki – laki	36	78, 26
2.	Perempuan	10	21, 74
		46	100, 00

**Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, 2009.**

Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai jumlah personil yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diharapkan memperlancar tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah pajak dan retribusi dalam rangka pencapaian PAD Kabupaten Indragiri Hilir.

Pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari berbagai tingkat dan berbagai disiplin ilmu. Pendidikan pegawai dapat menentukan golongan serta pengkajian dari antar pegawai, disamping itu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir individu, semakin tinggi pendidikan pegawai akan lebih baik pola pikir dan sekaligus akan berpengaruh dengan kinerja pegawai. Di samping itu pendidikan pegawai dituntut kualitas dalam menghadapi era keterbukaan. Untuk melihat jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah dirinci menurut pendidikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.7 : Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Dirinci Menurut Pendidikan.**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Keterangan
1.	SD	-	-
2.	SMP	2	2 Orang
3.	SLTA	16	16 Orang
4.	Sarmud/ D. III	4	4 Orang
5.	S1	24	24 Orang
		46	46 Orang

**Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, 2009**

Dari tabel diatas perbandingan jenjang pendidikan S1 berjumlah 24 orang dan SLTA 16 orang dan di tuntut untuk menyelesaikan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Perda No. 21 Tahun 2001 tentang retribusi parkir pasal 5 tarif retribusi parkir setiap kali parkir.



1. Kendaraan golongan I termasuk di dalamnya sepeda, gerobak, becak sepeda Rp. 300,-
2. Kendaraan Golongan II termasuk di dalamnya adalah sepeda motor/ skuter besarnya retribusi Rp. 500,-
3. Kendaraan golongan III, termasuk berupa mobil jep, minibus, kijang, dll besarnya retribusi Rp. 1000,-
4. Kendaraan golongan IV, termasuk di dalamnya mobil tangki yang panjangnya 6 m besar tariff Rp. 1200,-
5. Kendaraan golongan V, termasuk di dalamnya mobil bus, mobil barang, truk gandengan besarnya tariff retribusi Rp. 1500,-
6. Kendaraan golongan VI, adalah berupa mobil alat berat besarnya tariff retribusi Rp. 2500,-

Dari jumlah kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat baik kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, juga kendaraan tidak bermotor. Salah satu retribusi yang menjanjikan untuk pemasukan daerah maka oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibuat Perda dengan Nomor : 08 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi dengan Perda Nomor : 21 Tahun 2001 yaitu tentang retribusi parkir, maka dari Pemerintah Daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir ini memberi target kepada Instansi terkait untuk sarana pemasukan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Guna melihat target dan realisasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat tabel berikut ini

**Tabel V.8 :Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006-2009.**

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1..	2006	11.400.000,-	7.900.000,-	69,30 %
2.	2007	14.000.000,-	1.450.000,-	7,27 %
3.	2008	40.000.000,-	17.000.000,-	43,00 %
4.	2009	40.000.000,-	20.000.000,-	50,00 %

**Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil 2009.**

Dari target yang diharapkan dan sesuai dengan sumber-sumber yang ada yaitu jumlah keadaan dan obyek-obyek yang ada. Maka dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memberi target sejak tahun 2006 target yang dicapai hanya terealisasi 69,30 %, 2007 target yang dicapai hanya terealisasi 7,27 %, 2008 target yang dicapai hanya terealisasi 43,00 % dari target, sedangkan tahun 2009 realisasi retribusi parkir hanya mencapai 50 %

Dari tabel diatas kita ketahui bahwa tidak tercapainya Target yang di inginkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sejak 2006 sampai dengan 2009.

## **V.2. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan dari Hipotesis Penelitian**

### **a. Insentif Yang Kurang**

Insentif adalah upah yang diberikan sebagai balas jasa atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan.

Petugas Parkir adalah orang yang diberi tugas untuk memungut parkir kepada pengguna jasa parkir. Para petugas parkir berjumlah 4 orang yang lokasi parkirnya

adalah lapangan parkir pasar di JL. Jend Sudirman Tembilahan. Disini perlu diketahui di dalam memungut retribusi parkir jarang - jarang petugas parkir yang memberikan tanda terima kepada pengguna parkir. Yang mana dalam hal ini dapat merugikan pemerintah setempat atau dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah yang dapat berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah/PAD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam table di bawah ini :

**Tabel V.9 : Tanggapan Responden Tentang Petugas Parkir.**

No.	Anggapan Responden	Jumlah	%
1.	Baik	5	16,25
2.	Cukup Baik	10	34,48
3.	Tidak Baik	15	49,27
		46	100,00

**Sumber Data : Hasil Penelitian, 2009**

Dari tabel diatas dimana tanggapan responden tentang Petugas Parkir terhadap pemberian tanda terima parkir. Responden yang mengatakan Baik berjumlah 5 orang responden atau 16,25%. Dari responden mengatakan bahwa petugas parkir sering memungut parkir sesuai insentif dengan tariff kendaraan masing-masing serta disertai tanda terima. Responden yang mengatakan Cuku Baik sebanyak 34,48%. Dimana petugas parkir jarang memberikan tanda terima dan tidak sesuai dengan tarif kendaraan. Sedangkan yang mengatakan Tidak Baik sebanyak 15 responden atau 49,27% yang mana petugas tersebut tidak memberikan tanda terima dan tarif yang tidak sesuai dengan Perda Retribusi Parkir. Mengapa hal seperti ini sering terjadi? Karna kurangnya insentif bagi petugas parkir.

## **1. Bentuk Insentif**

Adapun bentuk insentif yang diinginkan oleh petugas parkir adalah Dari responden mengatakan bahwa petugas parkir sering memungut parkir sesuai insentif dengan tarif kendaraan masing-masing serta disertai tanda terima. Contoh : Apabila pengguna jasa parkir terkena biaya parkir Rp. 300,- dan ditambah dengan insentif yang diinginkan petugas parkir Rp. 300,-. Jadi total Rp. 600,-. Dikatakan Rp. 600,- itu tanggung atau mendekati dengan dari Rp. 1000,- dan terkadang petugas parkir mengatakan tidak ada uang kembaliaannya. Maka dari itu terkadang – kadang petugas parkir tidak mengembalikan kembaliaannya dan begitu juga sebaliknya, pengguna jasa parkir pun terkadang tidak mempersalahkan hal tersebut.

## **b. Pengawasan Dari Pemerintah atau Instansi Terkait**

Pengawasan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis mendeskripsikan hubungan antara operasional program kebijakan dan hasilnya, maka pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. Dalam bahasa yang sederhana, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya.

Ditemukan banyak batasan pengertian mengenai pengawasan. *“Control is assurance that the performance conform to plan”*

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Di Indonesia system pengawasan telah diatur dalam Instruktur Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1983, akan tetapi peraturan hokum tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan pengertian pengawasan itu sendiri. Istilah pengawasan dikenali dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsure dalam kegiatan pengelolaan. Wajarlah apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen dari pada ilmu hukum.

Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry seperti yang dikutip Muchsan (2000) menyatakan “ *Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan.*” Dari pengertian ini nampak bahwa pengawasan ini dititik beratkan kepada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan diarahkan pada bidang-bidang strategis, dan secara operasional dipokuskan pada kegiatan yang memberikan masukan yang lebih bermakna bagi manajemen dalam rangka menyusun akuntabilitas (pertanggung jawaban) keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Akuntabilitas

yang dilakukan oleh organisasi/perorangan memerlukan suatu pengawasan/audit/evaluasi/penilaian mengenai aspek akuntabilitas itu sendiri dari pihak lain, sebelum dilaporkan kepada pihak yang memberi otorisasi pengelolaan sumber daya milik Negara. Pengawasan setidaknya memakai empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu : eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. Pertama pengawasan mengimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang di canangkan berbeda. Kedua pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atau perubahan social ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Ketiga, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Keempat, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintahan dan atau lembaga proposional.

Proses pengawasan haruslah melalui beberapa tahap, diantaranya menetapkan standar (*estabilishing standard*). Standar dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan berhasil, gagal, atau sekedar adanya penyimpangan pencapaian perencanaan. Disamping itu tahapan penting lainnya adalah menyiapkan pengukur kinerja (*measuring performance*), membandingkan kinerja dan standar (*comparing performance against standart*), mengevaluasi dan melakukan tindakan (*evaluation and action*). Tindak lanjut dari evaluasi itu adalah mempertahankan status-quo (*maintain*

*status quo*) atau mengoreksi penyimpangan (*correct the deviation*) dan atau merubah standar (change standard).

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan merupakan factor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa di implementasikan kebijakan publik hanya menjadi dokumentasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu.

Kebijakan yang telah di rekomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasi. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan Pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari kehari yang membawa dampak pada warga Negara. Dalam literature administrasi Negara klasik, politik dan administrasi di pisahkan.

Berdasarkan dari pantauan penulis dilapangan, para petugas parkir jarang mendapatkan pengawasan dari instansi terkait dalam hal pencapaian target retribusi parkir guna peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah tentang tanda terima parkir. Yang mana dalam memungut parkir terdapat pengguna jasa parkir, para petugas parkir jarang yang memberikan tanda terima parkir berbeda dengan golongan

kendaraan yang diparkir dan setelah keluar tanda tersebut harus dikembalikan pada petugas parkir yang menjaga didepan pintu masuk. Hal ini dapat dilihat parkir pasar Tembilahan, hal ini memberikan dampak buruk terhadap pendapatan retribusi parkir, karena kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir.

### **V.3. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan dari Variabel Penelitian**

#### **a. Penerimaan Retribusi Parkir**

Retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa orang-orang yang menikmatinya atau orang yang berkepentingan dalam arti, setiap retribusi dilakukan berarti yang membayar akan kendaraan dipungut retribusi bagi pemasaran yang memarkirkan kendaraannya di pasar atau di dalam Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

Kendaraan disini adalah kendaraan yang dipergunakan dalam Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan subjek retribusi adalah setiap orang pribadi, badan hukum, organisasi atau kelompok/ perkumpulan yang memiliki kendaraan menggunakan kendaraan, memakai atau menyewa kendaraan maka dipungut retribusi bagi kendaraan yang memarkir di dalam Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Kendaraan golongan I, termasuk di dalamnya adalah sepeda, gerobak, becak, sepeda dan becakserta gerobak di Tembilahan Kota adalah berjumlah kurang lebih 18.000 sampai 25.000 unit kendaraan, namun becak boleh dikatakan tidak dipungut retribusinya, hanya sepeda yang dapat dipungut retribusi berupa parkir. Untuk melihat tanggapan responden tentang retribusi parkir sepeda dapat dilihat tabel berikut ini :



**Tabel V.10 : Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Sepeda di Pasar Tembilahan.**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	%
1.	Baik	2	5, 90
2.	Cukup Baik	16	52, 72
3.	Tidak Baik	12	41, 38
		46	100, 00

**Sumber Data : Hasil Penelitian, 2009.**

Dari tabel di atas dimana tanggapan responden tentang parkir sepeda, dimana ditanggapi oleh 30 responden. Dimana dari 30 responden, yang memberi tanggapan Baik yaitu berjumlah 2 responden atau 5,90%, Cukup Baik 16 responden 52, 72 dan Tidak Baik 12 responden 41, 38% dari tanggapan responden mengatakan bahwa dari pemungut dan wajib parkir sama-sama menyadari arti penting pembayaran arti penting pembayaran retribusi parkir sepeda dan dilaksanakan oleh petugas parkir dan wajib bayar parkir sama-sam baik.

Sedangkan yang mengatakan kategori Baik 2 responden 5,90 %, Cukup Baik yaitu berjumlah 16 responden atau 52,72% dari tanggapan responden dari juru pungut dan wajib bayar retribusi sama-sama mempunyai kesadaran untuk memungut dan membayar dengan tarif yang yang ditentukan Rp. 300,- dan tanggapan Cukup Baik. Yang mengatakan tanggapan Tidak Baik 12 responden 41, 38% dari tanggapan responden mengatakan bahwa pembayaran retribusi diambil sebesar Rp. 300,- namun tidak ada karcis tanda terima sehingga dari tanggapan Tidak Baik dengan alasan kemana uang Rp. 300,- kali berapa perhari tidak jelas. Jadi retribusi parkir sepeda dapat

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutannya dapat dikatakan Cukup Baik dengan tanggapan 16 responden atau 52,72% dari 30 responden yang memberi tanggapan.

## 2. Kendaraan Roda Dua (Kendaraan Golongan II)

Kendaraan golongan II, di dalamnya adalah kendaraan roda dua seperti motor dan vespa, dimana Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di kota Tembilahan dari kurang lebih 5 Tahun ini menakjubkan peningkatan yang sangat pesat, dari sinilah bahwa jasa retribusi parkir sangat menjanjikan sebagai pendapatan asli daerah, sangat besar pemasukan pendapatan asli Daerah dan apabila dikelola dengan benar disamping peningkatan PAD juga akan banyak menyerap tenaga kerja, obyek dari parkir dari kendaraan roda II yaitu sepeda motor dan vespa. Untuk melihat tanggapan responden tentang retribusi kendaraan golongan II termasuk didalamnya sepeda motor dan vespa dapat dilihat tabel tanggapan di bawah ini :

**Tabel V.11 : Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Golongan II.**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	%
1.	Baik	2	5, 90
2.	Cukup Baik	15	49, 27
3.	Tidak Baik	13	44, 83
		46	100, 00

**Sumber Data : Hasil Penelitian, 2009.**

Dari tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang retribusi parkir kendaraan golongan II yang termasuk didalamnya sepeda motor dan vespa ditanggapi

oleh 30 responden yaitu pengguna/ wajib bayar retribusi golongan II sepeda motor dan vespa. Dari tanggapan responden yang mengatakan Baik yang berjumlah 2 responden 5, 90 %, Yang mengatakan kategori tanggapan Cukup Baik yaitu berjumlah 15 responden atau 49, 27% dimana dari tanggapannya mengatakan bahwa pungutan retribusi sepeda motor dilakukan pada tempat parkir yang ditentukan dan dalam pungutannya memakai karcis dan kadang-kadang tidak memberi karcis dan rata-rata dari beberapa tempat dipungut Cukup Baik sesuai aturan Rp. 500,- dan langsung memakai karcis parkir. Sedangkan yang mengatakan tanggapan Tidak Baik yaitu berjumlah 13 responden atau 44, 83% dimana responden berasal dari petugas pemungut retribusi dan wajib bayar retribusi sepeda motor dari tanggapan responden mengatakan bahwa dalam pemungutan retribusi sepeda motor dan skuter/ vespa dari petugas tidak ada standar Rp. 500,- tetapi melebihi dan tidak memakai tanda bukti karcis.

Jadi, dari beberapa tanggapan responden tentang retribusi kendaraan bermotor berupa sepeda motor dan vespa dapat dikatakan Baik walau kadang-kadang tidak ada bukti karcis tetapi sesuai biaya yang ditetapkan dan kategori tanggapan Baik dengan besarnya tanggapan 15 responden atau 49, 27% dari 30 responden yang memberi tanggapan.

### 3. Kendaraan Golongan III

Kendaraan Golongan III adalah kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minibus mikrolet, pick up, combi, station, wagon dan sejenisnya. Dimana mobil-mobil ini sudah beroperasi di kota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hilir umumnya, dari data yang ada sudah hamper ribuan unit disini sangat beroperasi dari obyek parkir. Dari

kendaraan golongan III ini penulis meminta tanggapan tentang penarikan obyek dari obyek parkir seperti tabel di bawah ini :

**Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Golongan III di Pasar Tembilaan.**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	%
1.	Baik	4	12, 80
2.	Cukup Baik	16	52, 72
3.	Tidak Baik	10	34, 48
		46	100, 00

**Sumber Data : Hasil Penelitian, 2009.**

Dari Tabel diatas, tentang retribusi parkir kendaraan golongan III berupa kendaraan mobil jeep, sedan, minibus mikrolet, pick up, combi, station, wagon dll sejenisnya. Dari tanggapan mobil-mobil di atas dipungut retribusi kendaraan yang memarkirkan kendaraannya dengan besarnya retribusi parkir sekali Rp. 1000,- dari tanggapan responden wajib bayar retribusi yang berjumlah 30 responden. Dari tanggapan responden yang mengatakan tanggapan Baik yaitu 4 12, 80 responden, yang mengatakan tanggapan Cukup Baik 10 34, 48 % dimana dari tanggapannya bahwa petugas pemungut retribusi memungut retribusi parkir denganTidak Baik yitu memungut sesuai tarif yang ditentukan hanya kadang-kadang tidak disertai tanda bukti karcis.

Dimana dari tanggapannya, petugas parkir kendaraan dalam pemungutannya Kurang Baik karena besarnya pemungutan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan yaitu Rp. 1000,- dan dipungut lebih dari itu serta tidak memakai karcis tanda bukti.

Jadi, diambil kesimpulan dari 30 responden dari parkir kendaraan golongan III ditanggapi oleh responden Cukup Baik dengan tanggapan 16 responden dan atau 52, 72% dari 30 responden yang memberi tanggapan.

#### 4. Kendaraan Golongan IV

Kendaraan golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki/ kendaraan gandeng dengan ukuran sampai kurang lebih 5 m dan sejenisnya, dimana di kota Tembilahan belum begitu banyak dan tempat parkir belum ada yakni hanya terminal M. Boya saja atau di jalan umum, namun jangka panjang adalah potensi daerah guna Pemasukan Asli Daerah/ PAD. Untuk melihat tanggapan responden tentang kendaraan golongan IV dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel IV.13 : Tanggapan Responden Tentang Kendaraan Golongan di Pasar Tembilahan.**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	%
1.	Baik	5	17, 24
2.	Cukup Baik	12	38, 93
3.	Tidak Baik	13	43, 83
		46	100, 00

**Sumber Data : Hasil Penelitian, 2009.**

Dari tabel diatas terdapat tanggapan 30 responden yakni dari wajib bayar retribusi parkir dari 30 responden yang mengatakan tanggapan Baik yaitu berjumlah 5 responden atau 17, 24% dari responden yang mengatakan bahwa dari petugas pemungut retribusi kendaraan kelas IV dengan Baik sesuai dengan tariff yaitu Rp. 1.250,- dan disertai dengan karcis tanda bukti pembayaran. Sedangkan yang

mengatakan tanggapan Cukup Baik yaitu berjumlah 12 responden atau 38, 93%. Dan Tidak Baik 13 responden 43,83%.

Jadi, diambil kesimpulan dari 30 responden dari parkir kendaraan Golongan IV ditanggapi oleh responden Tidak Baik dengan tanggapan 13 responden dan atau 43, 83% dari 30 responden yang memberi tanggapan.

Dimana dari tanggapannya, mengatakan bahwa petugas pemungut retribusi memungut retribusi kendaraan golongan IV dengan karcis tanda terima Rp. 1.250. untuk melihat tanggapan responden tentang retribusi parkir kendaraan dapat dilihat tabel di bawah ini :

**Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Pasar Tembilahan.**

No	Sub Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	C. Baik	T. Baik	
1.	Kendaraan Gol. I	2	16	12	30
2.	Kendaraan Gol. II	2	15	13	30
3.	Kendaraan Gol. III	4	16	10	30
4.	Kendaraan Gol. IV	5	12	13	30
Jumlah		13	59	48	120
Rata - rata		5	15	10	30
Prosentase		17,25	47,91	34,84	100,00

**Sumber Data : Hasil Penelitian, 2009.**

Dari table diatas rekapitulasi tanggapan terdapat tanggapan rata-rata 30 responden dari petugas masing-masing wajib bayar parker, dimana indicator pemakaian

kendaraan golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Yang mengatakan kategori tanggapan Baik rata-rata ditanggapi oleh 2 responden dan memberi tanggapan Cukup baik ditanggapi rata-rata 15 responden atau 47,91% dan yang mengatakan Tidak Baik rata-rata ditanggapi oleh 13 responden atau 34,84%. Jadi diambil suatu kesimpulan dari rekapitulasi tanggapan ditanggapi Cukup Baik dengan besarnya tanggapan responden 15 responden atau 47,91%. Akan tetapi target yang ingin di capai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sejak 2006 sampai dengan 2009 belum bisa di penuhi.

#### **V.4. Faktor Penghambat Tidak Tercapainya Retribusi**

Menurut Ndraha, (1982 : 14) juga mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintah dari suatu pelaksanaan pembangunan desa ditentukan oleh beberapa factor sebagai berikut :

1. Adanya factor perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
2. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten mengolah supaya membangun dari tahap ketahap berikutnya sesuai dengan rencana.

Didalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Tembilahan Kota mempunyai kendala – kendala yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas.

Untuk itu di dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa – beberapa hambatan – hambatan yang di jumpai selama penelitian ini :

1. Dari Personal Anggota Pegawai

- a. Banyak juru parkir yang liar yang dilakukan anak – anak dan pemungutannya melebihi ketentuan dan memungut tidak memakai tanda bukti sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir.
- b. Tidak adanya insentif yang di berikan kepada petugas parkir
- c. Tidak adanya pengawas dari pihak atasan, Kabag atau Kasubag
- d. Belum tersedianya fasilitas parker tetap, sehingga tempat parker masih sangat terbatas dan parker kendaraan di tepi jalan dan juga berpengaruh terhadap pemungutan jasa parker dan menjadi factor penghambat.
- e. Tidak ada sanksi/ tindakan Korektif yang tegas yang dilakukan oleh Kabag/ Kasubag, apabila tidak tercapainya target yang di inginkan
- f. Perilaku dari pemakai kendaraan memarkir kendaraan di luar lokasi parkir sehingga jelas mengganggu Perda No. 1 Tahun 2001.
- g. Alokasi parkir untuk kendaraan golongan III keatas juga berpengaruh terhadap Perda No.21 Tahun 2001.
- h. Perilaku dari petugas pemungutan parkir yang kadang kurang peduli kendaraan yang diparkir sehingga dari wajib parkir, diparkirkan di tepi jalan sehingga tidak terjaring oleh petugas.
- i. Kurangnya tenaga pemungut retribusi parkir di Tembilahan Kota, sehingga kurang efektif dan efisien pekerjaan yang dilakukan dan minimnya tenaga di lapangan. Selanjutnya dalam hal melaporkan hasil pungutan retribusi tersebut cenderung asal – asalan dan teradministrasi dengan baik pelaksanaan tugas tersebut.



- j. Banyaknya para pegawai yang malas – malasan dalam melaksanakan tugas, karena tidak ada sanksi jika target yang telah ditetapkan tidak tercapai.
- k. Belum tersedianya lokasi parkir tetap, sehingga tempat parkir masih sangat terbatas dan parkir kendaraan di tepi jalan dan juga berpengaruh pada pemungutan jasa parkir dan menjadi factor penghambat.
- l. Kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang memungut retribusi di Tembilahan Kota, sehingga mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas.

## 2. Dari Masyarakat

maupun berdasarkan wawancara kepada masyarakat dan penyimpulan penulis dari hasil bicara lepas di lapangan penelitian :

- a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat pada Umumnya terhadap pentingnya retribusi pasar, sehingga sering diartikan bahwa retribusi sebagai uang paksa yang harus dibayar masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa parkir dalam melakukan pembayaran retribusi pasar Tembilahan Kota.
- c. Banyaknya para petugas parkir yang membandel dalam melaksanakan pungutan retribusi. Seperti, tidak memberikan karcis dan jika masyarakat membayar retribusi parker yang sesuai dengan Golongan Kendaraan Tersebut, misalnya Kendaraan Golongan I dan II yang seharusnya Golongan I hanya Rp. 300, Golongan II Rp. 500 dan Pengguna Jasa memberi uang Rp. 1000, akan tetapi petugas ini mengatakan bahwa uang

recek (kembaliannya) tidak ada dan otomatis sang Pengguna Jasa mau tak mau mengikhlaskannya.

- d. Banyak para masyarakat yang membandel dalam melaksanakan kewajiban, seperti, jika petugas pemungut retribusi datang, para pemilik usaha memerintahkan kepada pegawainya mengatakan bahwa mereka sedang tidak ada di tempat.
- e. Perilaku dari petugas pemungutan parkir yang kadang kurang peduli kendaraan yang diparkir sehingga dari wajib parkir, diparkirkan ditepi jalan sehingga tidak terjaring oleh petugas parkir.
- f. Kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang memungut retribusi di Tembilahan Kota, sehingga mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas.
- g. Terkadang, pemungut parkir tidak memberikan tanda terima karcis yang seharusnya di berikan kepada pemakai jasa parkir pada saat memarkirkan kendaraan tersebut. Hal ini bisa menimbulkan peluang Korupsi/ penyalahgunaan dalam laporan
- h. Kurangnya tenaga pemungut retribusi parkir di Tembilahan Kota, sehingga kurang efektif dan efisien pekerjaan yang dilakukan dan minimnya tenaga di lapangan. Selanjutnya dalam hal melaporkan hasil pungutan retribusi tersebut cenderung asal – asalan dan teradministrasi dengan baik pelaksanaan tugas tersebut.
- i. Kurang pengetahuan yang merata pada masyarakat terhadap pentingnya retribusi parkir di Tembilahan Kota, sehingga sering kali diartikan bahwa

pungutan retribusi ini sebagai pemanfaatan/ uang paksa yang harus di bayar masyarakat sebagai balas jasa parkir.

- j. Kurang pedulinya/ kurang kritis dalam melakukan pembayaran retribusi parkir kepada petugas yang selalu membandel di Tembilahan Kota, yang tanpa karcis parker.
- k. Ada sebahagian Masyarakat yang mempersalahkan tentang pemungutan retribusi dengan Petugas Pakir tanpa Karcis.
  - 1. Akan terjadi penyelewengan dana retribusi atau penyalah gunaan dana retribusi tersebut.
  - 2. Sebab Pemungut retribusi parkir lebih dominan tanpa menggunakan karcis, sehingga memudahkan untuk Penyelewengan Dana (Korupsi).

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, di dalam bab VI ini penulis mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi dan juga mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi dan juga mencoba untuk memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Adapun kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **VI.1. Kesimpulan**

Pada hasil penelitian ini diperoleh terhadap suatu tinjauan tentang Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir sebagai berikut :

1. Perda No. 21 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Kendaraan golongan I berupa sepeda becak, sepeda dan gerobak, yang besarnya Rp. 300,-/sekali parkir, kendaraan golongan II berupa sepeda motor/vespa yang besarnya Rp. 500,-/sekali parkir, serta kendaraan golongan VI berupa kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki, truk gandeng yang besarnya parkir Rp. 1250,-/sekali parkir. dapat dikatakan tanggapan Cukup Baik dari hasil rekapitulasi tanggapan dengan besarnya tanggapan rata-rata indikator 15 responden atau 49,27% dari 30 responden yang memberi tanggapan.

Kendaraan golongan I adalah kendaraan tidak bermotor berupa sepeda, becak dan gerobak yang besarnya retribusi parkir Rp. 300,-/setiap kali parkir, Kendaraan

golongan II adalah kendaraan bermotor roda dua, termasuk jenis sepeda motor dan vespa dengan tariff Rp. 500,-,

Kendaraan golongan III adalah kendaraan bermotor jeep, kijang, sedan, minibus dll yang besarnya retribusi parkir Rp. 1000,- sekali parkir.

Kendaraan golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa bus, tangki yang panjangnya 5 m dan sejenisnya dengan retribusi sebesar Rp. 1200,- sekali parkir.

Kendaraan golongan V adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus ukuran besar, truk gandeng dengan retribusi sebesar Rp. 1500,- dan

Kendaraan golongan VI a/b adalah kendaraan bermotor berupa mobil barang, mobil truk gandeng, alat-alat berat dengan retribusi sebesar Rp. 2500,-

1. Faktor-faktor target retribusi susah di realisasikan antara lain :
  - a. Banyaknya juru parkir yang liar yang dilakukan anak-anak dan pemungutannya melebihi ketentuan dan memungut tidak memakai tanda bukti sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir.
  - b. Perilaku dari pemakai kendaraan memarkir kendaraan diluar lokasi parkir sehingga jelas mengganggu Perda No. 21 tahun 2001
  - c. Alokasi parkir untuk kendaraan golongan III keatas juga berpengaruh terhadap Perda No. 21 tahun 2001
  - d. Belum tersedianya fasilitas parkir tetap, sehingga tempat parkir masih sangat terbatas dan parkir kendaraan di tepi jalan dan juga berpengaruh terhadap pemungutan jasa parkir dan menjadi factor penghambat.

- e. Perilaku dari petugas pemungut parkir yang kadang kurang peduli kendaraan yang diparkir di tepi jalan sehingga tidak terjangkau oleh petugas parkir.

## **VI.2. SARAN – SARAN**

Adapun dalam penulis ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dari Dinas terkait sebaiknya menertibkan petugas parkir liar sehingga tidak merugikan pengguna jasa parkir.
2. Diperlukan suatu pendidikan khusus keparkiran agar petugas parkir betul-betul menjaga kendaraan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan perparkiran.s
3. Dari indikator – indikator parkir dilakukan dengan petugas parkir dengan Cukup Baik dan selanjutnya perlu ditingkatkan pelayanannya.
4. Pemungut parkir sebaiknya di instruksikan apabila memungut jasa parkir disertai karcis tanda bukti serta pengawasan terhadap petugas parkir perlu ditingkatkan lagi oleh instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah.
5. Melakukan penyusunan dengan situasi dan kondisi dengan pertumbuhan ekonomi di pasaran dengan merevisi Peraturan Daerah Perda tentang Retribusi daerah dalam hal parkir. Revisi ini selama tiga tahun terakhir hanya dilakukan sekali yaitu pada tahun 1998.
6. Data ini di dapat berdasarkan Hasil Wawancara dan Diskusi lepas di lapangan atau lokasi penelitian dan penulis tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi sebuah kesimpulan yang sudah di Refisi sebaik mungkin.
7. Meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa parkir dengan cara memberikan pelayanan dengan ramah tamah dan penampilan. Meningkatkan kejujuran petugas

untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Banyak juru parkir yang liar yang dilakukan anak – anak dan pemungutannya melebihi ketentuan dan memungut tidak memakai tanda bukti sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir.
- b. Tidak adanya insentif yang di berikan kepada petugas parkir
- c. Tidak adanya pengawas dari pihak atasan, Kabag atau Kasubag
- d. Belum tersedianya fasilitas parker tetap, sehingga tempat parker masih sangat terbatas dan parker kendaraan di tepi jalan dan juga berpengaruh terhadap pemungutan jasa parker dan menjadi factor penghambat.
- e. Tidak ada sanksi/ tindakan Korektif yang tegas yang dilakukan oleh Kabag/ Kasubag, apabila tidak tercapainya target yang di inginkan
- f. Perilaku dari pemakai kendaraan memarkir kendaraan di luar lokasi parkir sehingga jelas mengganggu Perda No. 1 Tahun 2001.
- g. Alokasi parkir untuk kendaraan golongan III keatas juga berpengaruh terhadap Perda No.21 Tahun 2001.
- h. Perilaku dari petugas pemungutan parkir yang kadang kurang peduli kendaraan yang diparkir sehingga dari wajib parkir, diparkirkan di tepi jalan sehingga tidak terjaring oleh petugas.
- i. Kurangnya tenaga pemungut retribusi parkir di Tembilahan Kota, sehingga kurang efektif dan efisien pekerjaan yang dilakukan dan minimnya tenaga di lapangan. Selanjutnya dalam hal melaporkan hasil

pungutan retribusi tersebut cenderung asal – asalan dan teradministrasi dengan baik pelaksanaan tugas tersebut.

- j. Banyaknya para pegawai yang malas – malasan dalam melaksanakan tugas, karena tidak ada sanksi jika target yang telah ditetapkan tidak tercapai.
- k. Belum tersedianya lokasi parkir tetap, sehingga tempat parkir masih sangat terbatas dan parkir kendaraan di tepi jalan dan juga berpengaruh pada pemungutan jasa parkir dan menjadi factor penghambat.
- l. Kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang memungut retribusi di Tembilahan Kota, sehingga mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas.
- m. Belum meratanya pengetahuan masyarakat pada Umumnya terhadap pentingnya retribusi pasar, sehingga sering diartikan bahwa retribusi sebagai uang paksa yang harus dibayar masyarakat.
- n. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa parkir dalam melakukan pembayaran retribusi pasar Tembilahan Kota.
- o. Banyaknya para petugas parkir yang membandel dalam melaksanakan pungutan retribusi. Seperti, tidak memberikan karcis dan jika masyarakat membayar retribusi parkir yang sesuai dengan Golongan Kendaraan Tersebut, misalnya Kendaraan Golongan I dan II yang seharusnya Golongan I hanya Rp. 300, Golongan II Rp. 500 dan Pengguna Jasa memberi uang Rp. 1000, akan tetapi petugas ini mengatakan bahwa uang



receh (kembaliannya) tidak ada dan otomatis sang Pengguna Jasa mau tak mau mengikhlaskannya.

- p. Banyak para masyarakat yang membandel dalam melaksanakan kewajiban, seperti, jika petugas pemungut retribusi datang, para pemilik usaha memerintahkan kepada pegawainya mengatakan bahwa mereka sedang tidak ada di tempat.
- q. Perilaku dari petugas pemungutan parkir yang kadang kurang peduli kendaraan yang diparkir sehingga dari wajib parkir, diparkirkan ditepi jalan sehingga tidak terjaring oleh petugas parkir.
- r. Kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang memungut retribusi di Tembilahan Kota, sehingga mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugas.
- s. Terkadang, pemungut parkir tidak memberikan tanda terima karcis yang seharusnya di berikan kepada pemakai jasa parkir pada saat memarkirkan kendaraan tersebut. Hal ini bisa menimbulkan peluang Korupsi/ penyalahgunaan dalam laporan
- t. Kurangnya tenaga pemungut retribusi parkir di Tembilahan Kota, sehingga kurang efektif dan efisien pekerjaan yang dilakukan dan minimnya tenaga di lapangan. Selanjutnya dalam hal melaporkan hasil pungutan retribusi tersebut cenderung asal – asalan dan teradministrasi dengan baik pelaksanaan tugas tersebut.
- u. Kurang pengetahuan yang merata pada masyarakat terhadap pentingnya retribusi parkir di Tembilahan Kota, sehingga sering kali diartikan bahwa

pungutan retribusi ini sebagai pemanfaatan/ uang paksa yang harus di bayar masyarakat sebagai balas jasa parkir.

- v. Kurang pedulinya/ kurang kritis dalam melakukan pembayaran retribusi parkir kepada petugas yang selalu membandel di Tembilahan Kota, yang tanpa karcis parkir.
  - w. Ada sebahagian Masyarakat yang mempersalahkan tentang pemungutan retribusi dengan Petugas Pakir tanpa Karcis.
8. Peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas serta penyusunan administrasi data potensi yang lebih baik dan terkendali.
9. Agar tercapainya target retribusi parkir tiap Tahunnya, Dispenda harus memperhatikan beberapa hal, antara lain adalah :
- a. Insentif dan Pengawasan dari atasan yang terkait
  - b. Seminar – seminar kepada Masyarakat tentang retribusi parkir di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - c. Seminar – seminar kepada Petugas Pegawai Parkir di Kota Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.
  - d. Mempunyai sanksi, pabila target retribusi tidak terpenuhi tiap tahunnya.
  - e. Belum terealisasi dengan baik Perda No. 21 Tahun 2001 tentang retribusi Pakir karna faktor – faktor penghambat seperti di atas tadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- S.H Sarundajang, 2000 **Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah**, Pustaka sinar harapan, Jakarta.
- Alex, Nitisemito, 1993, **Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar**, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Abdurrachman, Arifin, 1991, **Kerangka Pokok-pokok Manajemen Umum**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rachmad, Sumitro, 1990, **Dasar-Dasar Hukum pajak dan Pajak Pendapatan**, Cetakan, IX, Eresco, Jakarta.
- Suparnoto, 1992, **Pajak Dan Retribusi**, Yemnur, Bandung.
- Handayaniingrat, 1991, **Teori Pengambilan Keputusan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasibuan, 1996, **Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah**, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Newman, 1996, **Teknik Pengambilan Keputusan**, Andi Offset, Yogyakarta.
- M. Manulang, 1990, **Dasar-Dasar Manajemen**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Nasir, 1992, **Metode Penelitian**, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasiution. S, 1990, **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**, Yemnur, Bandung.
- \_\_\_\_\_, Kutipan Munawir, 1991, **Pokok-Pokok Perpajakan**, Liberty, Yogyakarta.
- Soetrisno, 1994, **Dasar-Dasar Ilmu Keuangan, Negara Dalam Pajak**, BPFE-UGM Yogyakarta.

SP. Siagian, **1995 Peranan staf Salam Manajemen**, PT. Gunung Agung, Jakarta

Soedargo, 1996, **Hukum Pajak dan Retribusi**, Ghalia Indonesia, Jakarta

Prawiraamidjaja, 1993, **Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal**, Andi Offset,  
Yogyakarta

Usman, 1992, **Pajak-Pajak Indonesia**, Yayasan Bina Pajak Jakarta.

Adriani, 1992, **Pengantar Ilmu Pajak**, PT. Eresco Jakarta.

Hirawan, Susi Yanti B, 1992, **Pembiayaan Pembangunan Daerah**, LPEE-UI  
dan PT. Gramedia Pustaka Utama jakarta.

Soedargo, 1996, **Hukum Pajak Dan Retribusi**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Daerah (**Perda**) **No. 21 tahun 2001**, tentang Retribusi Parkir.

Sekretariat Negara RI, **UU Darurat Nomor 11 tahun 1957** tentang Peraturan  
Pajak Daerah

Sekretariat Negara RI, **UU Darurat Nomor 12 tahun 1957** tentang Peraturan  
Umum retribusi Daerah

UU No. 32 tahun 2004, **tentang Pemerintah Daerah**, Asa Mandiri

UU No. 22 tahun 2000, 1999, **tentang Pemerintah Daerah**, Sinar Grafika,  
Jakarta.

UU No. 25 tahun 1999, **tentang Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**. Sinar  
Grafika, Jakarta.

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar                      Halaman

Gambar : Bagian Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri  
Hilir..... 48

## DAFTAR TABEL

Table I.1.	: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006-2009.....	11
Tabel IV.2	: Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
Tabel IV.3	: Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Dirinci Menurut Pendidikan.....	46
Tabel IV.4	: Golongan Pangkat Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	46
Tabel IV.5	: Masa Kerja Pegawai Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	47
Tabel V.6	: Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Sepeda di Pasar Tembilahan. ....	51
Tabel V.7	: Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Golongan II.....	52
Tabel V.8	: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006-2009.....	54
Tabel V.9	: Tanggapan Responden Tentang Petugas Parkir.....	55
Tabel V.10	: Rekapitulasi Tanggapan Tentang Retribusi Parkir Sepeda di Pasar Tembilahan. ....	61

Tabel V.11.	: Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Golongan	
II.....		62
Tabel V.12.	: Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Golongan	
III.....		64
Tabel V.13.	: Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Golongan	
IV.....		65
Tabel V.14.	: Tanggapan Responden Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Golongan	
di	Pasar	Tembilahan
Kota.....		66

